

Analisis Sistem Pengamanan dalam Menangani Overcrowding dan Konflik Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru

Rizki Ananda Nst.Am¹ Riky Novarizal²

¹Universitas Islam Riau, rizkianandanst.am@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, riky.novarizal@soc.uir.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2026

Revised May 19, 2026

Accepted June 02, 2026

Available online June 30, 2026

Kata Kunci:

Overcrowding; Sistem Pengamanan;
Konflik Warga Binaan; Lembaga
Perasyarakatan

Keywords:

Overcrowding; Security System; Inmate
Conflict; Correctional Institution.

*Corresponding author

E-mail addresses:

rizkianandanst.am@student.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas
Islam Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis sistem pengamanan dalam menangani overcrowding dan potensi konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Overcrowding di lembaga pemasyarakatan menjadi persoalan krusial karena berimplikasi pada meningkatnya gangguan keamanan dan ketertiban serta konflik antarwarga binaan. Namun, kajian mengenai strategi pengamanan dalam menangani kondisi tersebut masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengamanan yang diterapkan meliputi strategi preventif, represif, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan jumlah petugas, minimnya sarana dan prasarana, serta tingginya tingkat hunian warga binaan. Kondisi overcrowding terbukti meningkatkan potensi konflik dan menurunkan efektivitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sumber daya manusia, peningkatan fasilitas keamanan, dan kebijakan penanggulangan overcrowding guna menciptakan kondisi pemasyarakatan yang aman dan kondusif.

ABSTRACT

This study aims to analyze the security system in addressing overcrowding and the potential for inmate conflict at Class IIA Pekanbaru Correctional Institution. Overcrowding in correctional institutions has become a crucial issue as it contributes to increased security and order disturbances as well as conflicts among inmates. However, studies examining security strategies to address these conditions remain limited. This study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and documentation. Data were analyzed using NVivo 12 software to identify patterns and relationships among the research findings. The results indicate that the implemented security system includes preventive, repressive, and early detection strategies to address potential security and order disturbances. Nevertheless, its implementation has not been optimal due to the limited number of officers, inadequate facilities and infrastructure, and the high occupancy rate of inmates. Overcrowding has been proven to increase the potential for conflict and reduce the effectiveness of supervision. Therefore, optimizing human resources, improving security facilities, and implementing overcrowding mitigation policies are necessary to create a safer and more conducive correctional environment.

1. PENDAHULUAN

Hukum pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dalam perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2022). Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana, tetapi juga sebagai institusi pembinaan sosial yang bertujuan memulihkan hubungan warga binaan dengan masyarakat (Wicaksono, 2022). Sejalan dengan itu, filosofi pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai subjek yang memiliki hak untuk diperbaiki melalui pembinaan kepribadian, kemandirian, dan pengawasan sosial guna mendukung reintegrasi sosial serta menekan residivisme (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024; Moeljatno, 2021). Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan modern membutuhkan keamanan adaptif karena pengamanan tidak lagi hanya berorientasi pada kontrol fisik, tetapi juga pada pengelolaan risiko dan stabilitas sosial guna mendukung efektivitas pembinaan dan rehabilitasi warga binaan.

Namun, implementasi sistem pemasyarakatan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural, salah satunya adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan. Overcrowding terjadi ketika jumlah narapidana atau tahanan melebihi kapasitas hunian ideal, sehingga berdampak pada menurunnya kualitas pembinaan, terbatasnya fasilitas dasar, serta meningkatnya risiko gangguan keamanan dan ketertiban (Sudirman, 2020). Berdasarkan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2024, jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencapai 277.500 orang, sementara kapasitas ideal nasional hanya sekitar 142.000 orang dengan tingkat hunian mencapai 195 persen (Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2024), Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara dengan tingkat kepadatan penjara yang tinggi di kawasan Asia Tenggara. Tren overcrowding nasional yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih sangat bergantung pada pendekatan pemenjaraan (*imprisonment-based system*) dibandingkan alternatif pemidanaan lainnya (Sudirman, 2020).

Kondisi overcrowding tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas pembinaan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian menunjukkan bahwa kepadatan hunian, keterbatasan ruang, dan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan tekanan sosial, kekerasan, serta eskalasi konflik antarwarga binaan (Baffour et al., 2023; Nudd et al., 2024). Beberapa kasus kerusuhan di Indonesia menunjukkan bahwa overcrowding menjadi faktor pemicu konflik di lapas. Peristiwa kebakaran dan kerusuhan di Lapas Kelas I Tangerang tahun 2021 yang menewaskan 41 warga binaan terjadi dalam kondisi hunian melebihi kapasitas ideal (Kompas.com, 2021). Selain itu, bentrokan antarwarga binaan di Lapas Bagan Siapi-api tahun 2022 serta kerusuhan di Lapas Tanjung Gusta Medan menunjukkan bahwa padatnya penghuni dan lemahnya pengawasan dapat meningkatkan eskalasi konflik (Antara.com, 2022; KBR, 2013). Dengan demikian, overcrowding merupakan ancaman nyata terhadap stabilitas keamanan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru merupakan salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menghadapi kondisi overcrowding secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru Tahun 2022, jumlah penghuni tercatat sekitar 1.450 orang (Lapas Kelas IIA Pekanbaru, 2022), sementara data Provinsi Riau Dalam Angka 2024 menunjukkan jumlah penghuni tahun 2023 mencapai 1.390 orang (Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, 2024). Selanjutnya, publikasi resmi Humas Lapas Kelas IIA Pekanbaru tahun 2024 menunjukkan jumlah penghuni meningkat menjadi 1.500 orang, padahal, kapasitas ideal hunian terus menurun dari 771 orang pada tahun 2022 menjadi 650 orang pada tahun 2024 (Humas Lapas Kelas IIA Pekanbaru, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat overcrowding di Lapas Kelas IIA Pekanbaru mencapai lebih dari 100 persen dan berdampak langsung terhadap beban sistem pengamanan serta stabilitas internal lembaga.

Sistem pengamanan di lembaga pemasyarakatan merupakan unsur fundamental dalam menjaga stabilitas, keselamatan, dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan. Menurut (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2024), sistem pengamanan di Lapas terdiri atas tiga komponen utama, yaitu pengamanan

fisik, pengamanan prosedural, dan pengamanan manusiawi. Pengamanan fisik mencakup sarana dan prasarana seperti tembok keliling, menara pengawas, jeruji besi, dan CCTV. Namun, fasilitas fisik di berbagai Lapas sering kali tidak lagi memadai akibat overcrowding dan keterbatasan anggaran pemeliharaan (Hamja, 2022). Pengamanan prosedural meliputi penerapan aturan, klasifikasi blok hunian, pemeriksaan keamanan, serta pengawasan aktivitas warga binaan. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengamanan prosedural sering terkendala akibat rasio petugas dan warga binaan yang tidak seimbang (Tyana & Kurnianingsih, 2025). Sementara itu, pengamanan manusiawi menekankan pendekatan pembinaan mental, moral, dan psikologis agar warga binaan lebih kooperatif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki diri (Prabawani et al., 2025).

Di sisi lain, overcrowding juga berdampak secara psikologis bagi warga binaan maupun petugas lembaga pemasyarakatan. Kondisi kepadatan yang ekstrem dapat memicu stres, ketegangan, dan perilaku agresif di kalangan warga binaan sehingga menciptakan lingkungan sosial yang rawan konflik (Prakoso, 2022). Selain itu, petugas lembaga pemasyarakatan juga mengalami tekanan mental dan kelelahan emosional akibat tingginya beban kerja yang harus ditanggung (Rahman, 2023). Situasi ini menunjukkan bahwa overcrowding menciptakan siklus permasalahan yang berulang, di mana kepadatan memicu konflik, konflik memperburuk ketegangan, dan pada akhirnya menurunkan kualitas pembinaan serta keamanan lembaga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa overcrowding merupakan persoalan krusial yang tidak hanya berdampak pada efektivitas pembinaan, tetapi juga terhadap stabilitas keamanan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun berbagai penelitian telah membahas overcrowding dan keamanan pemasyarakatan, kajian yang secara spesifik menganalisis sistem pengamanan dalam menangani overcrowding dan potensi konflik warga binaan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengamanan dalam menangani overcrowding dan potensi konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

1. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus deskriptif untuk memahami secara mendalam sistem pengamanan dalam menghadapi kondisi overcrowding dan potensi konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak tampak secara jelas (Yin, 2018). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi proses sosial, pengalaman individu, serta praktik kelembagaan yang kompleks secara holistik dan kontekstual (Creswell, 2014; Moleong, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang mengalami kondisi overcrowding cukup tinggi sehingga relevan untuk menganalisis pelaksanaan sistem pengamanan dalam menghadapi tekanan overkapasitas dan dinamika sosial antarwarga binaan. Penelitian dilaksanakan pada 6 April hingga 14 April 2026. Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi guna memperoleh data yang sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian dan kemampuan memberikan informasi yang dibutuhkan secara mendalam. Informan dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasikan menjadi informan kunci (*key informan*) dan informan pendukung (Suyanto, 2005). Informan kunci dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dan Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), sedangkan informan pendukung meliputi petugas pengamanan (sipir) serta warga binaan pemasyarakatan. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan durasi rata-rata 4–5 menit pada setiap informan menyesuaikan kondisi dan prosedur keamanan lembaga pemasyarakatan. Informan penelitian secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Key Informan dan Informan penelitian

No	Narasumber	Key Informan	Informan	Jumlah
1	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru	1	-	1
2	Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP) Kelas IIA Pekanbaru	1	-	1
3	Petugas Pengamanan (Sipir) Lapas Kelas IIA Pekanbaru	-	1	1
4	Warga Binaan Pemasyarakatan	-	2	2
	Jumlah	2	3	5

Sumber : *Modifikasi Penulis, 2025*

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan resmi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan dengan fokus penelitian (Indriantoro & Supomo, 2013). Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan lembaga pemasyarakatan dan aktivitas pengamanan secara langsung (Adi, 2010), sementara wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman informan terhadap sistem pengamanan dalam kondisi overcrowding (Koentjaraningrat, 1997; Sarosa, 2017). Dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data hasil observasi dan wawancara (Sudaryono, 2019; Sukmadinata, 2011).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 2014). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai untuk mengorganisasikan, memahami, dan menafsirkan data secara sistematis. Untuk mendukung proses analisis, penelitian ini memanfaatkan perangkat lunak NVivo 12 sebagai alat bantu pengolahan data kualitatif melalui proses pengkodean (*coding*), pengelompokan tema (*node*), dan identifikasi pola hubungan antar kategori data sehingga analisis menjadi lebih terstruktur, transparan, dan konsisten (QSR International, 2020).

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dipengaruhi oleh kondisi overcrowding dan potensi konflik antarwarga binaan. Penelitian ini menggambarkan kondisi aktual di lapangan terkait pelaksanaan pengamanan, peran petugas, serta dinamika interaksi sosial dalam situasi kelebihan kapasitas. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), petugas pengamanan (sipir), serta warga binaan pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai upaya pengamanan yang dilakukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, seperti pengawasan rutin, patroli, dan pendekatan persuasif. Namun, pelaksanaan pengamanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas hunian, jumlah petugas pengamanan, serta dinamika sosial antarwarga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan.

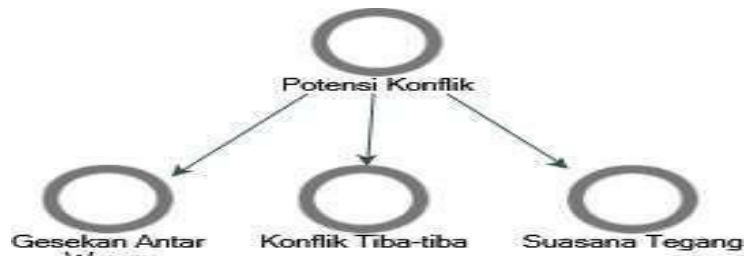
2.1 Visualisasi *Word Cloud* Hasil Wawancara

Gambar 3.1 Visualisasi Word Cloud Hasil Wawancara



Berdasarkan Gambar 3.1, hasil visualisasi *word cloud* menunjukkan bahwa kata “biasa” memiliki frekuensi kemunculan tertinggi, diikuti oleh kata “masalah,” “konflik,” “situasi,” dan “kondisi.” Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi yang berulang dalam kehidupan sehari-hari warga binaan berkaitan dengan berbagai persoalan di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Kemunculan kata “konflik,” “situasi,” dan “kondisi” mengindikasikan adanya dinamika sosial yang dipengaruhi oleh kepadatan hunian dan tekanan lingkungan. Selain itu, kata “petugas” dan “pengamanan” menunjukkan peran petugas dalam menjaga stabilitas melalui pengawasan langsung dan kontrol aktivitas warga binaan. Sementara itu, kemunculan kata “pendekatan” dan “koordinasi” menunjukkan adanya strategi interpersonal yang digunakan dalam upaya menjaga kondisi tetap kondusif.

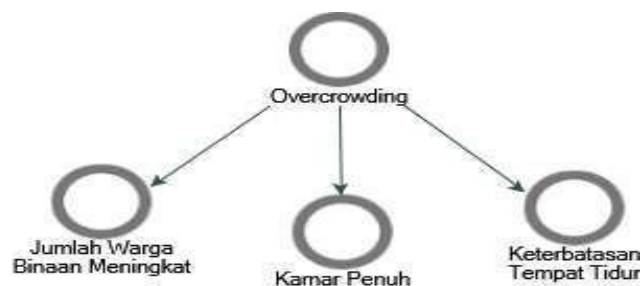
2.2 Potensi Konflik Warga Binaan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 3.2, potensi konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dipengaruhi oleh tiga indikator utama, yaitu gesekan antarwarga binaan, konflik yang muncul secara tiba-tiba, dan suasana tegang di dalam lingkungan lapas. Gesekan antarwarga binaan terjadi akibat intensitas interaksi yang tinggi dalam ruang terbatas, sehingga persoalan kecil dapat berkembang menjadi perselisihan. Suasana tegang mencerminkan adanya tekanan psikologis yang dialami warga binaan akibat kondisi overcrowding, keterbatasan fasilitas, dan padatnya aktivitas harian. Sementara itu, konflik yang muncul secara tiba-tiba menunjukkan adanya akumulasi permasalahan yang sebelumnya tidak terselesaikan dan kemudian memicu pertikaian secara spontan. Keterkaitan antarindikator tersebut menunjukkan bahwa konflik di dalam lapas bersifat dinamis, dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lingkungan, serta berpotensi berkembang dari konflik laten menjadi konflik terbuka apabila tidak segera ditangani melalui pengawasan dan pendekatan preventif.

2.3 Kondisi Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.3, kondisi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru ditunjukkan melalui tiga indikator utama, yaitu kamar hunian yang penuh, keterbatasan tempat tidur, serta meningkatnya jumlah warga binaan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang signifikan antara kapasitas lapas dengan jumlah penghuni yang harus ditampung. Keterbatasan ruang hunian menyebabkan warga binaan mengalami tekanan fisik berupa sempitnya ruang gerak, serta tekanan psikologis akibat menurunnya kenyamanan selama menjalani masa pembinaan. Selain berdampak pada aspek fisik, overcrowding juga memengaruhi interaksi sosial antarwarga binaan. Tingginya intensitas pertemuan dalam ruang yang terbatas meningkatkan kemungkinan terjadinya gesekan, ketegangan, hingga konflik. Dengan demikian, overcrowding tidak hanya menjadi persoalan kapasitas, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan kondisi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan.

2.4 Penyebab Konflik Warga Binaan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.4, penyebab konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu masalah makanan, kondisi emosional, senggol-senggolan, serta keterbatasan tempat tidur. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berpotensi memicu perselisihan antarwarga binaan. Permasalahan yang awalnya sederhana dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar akibat kondisi lingkungan yang padat dan terbatas. Masalah makanan sering menimbulkan ketidakpuasan, sementara kondisi emosional mencerminkan tekanan psikologis yang dialami warga binaan selama berada di dalam lapas. Senggol-senggolan menunjukkan tingginya intensitas interaksi fisik dalam ruang sempit, sedangkan keterbatasan tempat tidur dan fasilitas lainnya memperbesar potensi ketegangan. Temuan ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipicu oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi lingkungan yang penuh tekanan dan keterbatasan sarana pendukung.

2.5 Sistem Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.5, sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan melalui pembatasan pergerakan, pengawasan petugas, dan patroli keliling. Pembatasan pergerakan bertujuan mengontrol aktivitas warga binaan agar tetap sesuai aturan. Pengawasan petugas dilakukan secara langsung untuk memantau situasi dan mendeteksi potensi gangguan keamanan. Sementara itu, patroli keliling berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di lingkungan lembaga pemasyarakatan.

2.6 Pencegahan Konflik Warga Binaan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.6, pencegahan konflik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan melalui pemerataan kamar, pendekatan personal, serta pemenuhan hak warga binaan. Pemerataan kamar bertujuan mengurangi kepadatan pada blok tertentu, sedangkan pendekatan personal dilakukan petugas untuk membangun komunikasi yang baik dengan warga binaan. Pemenuhan hak juga berperan dalam menjaga stabilitas sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik tidak hanya dilakukan melalui pengamanan, tetapi juga melalui pendekatan sosial untuk menekan potensi konflik sejak awal.

2.7 Penanganan Konflik Warga Binaan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.7, penanganan konflik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan melalui pengamanan awal, pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP), serta pengasingan ke sel tertentu. Pengamanan awal bertujuan menghentikan konflik secara langsung, sedangkan pemeriksaan BAP dilakukan sebagai bagian dari proses administratif. Pengasingan dilakukan untuk mencegah konflik meluas dan menjaga stabilitas keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik dilakukan secara cepat dan terstruktur.

2.8 Upaya Perbaikan Sistem Pengamanan



Sumber: Data Diolah, Nvivo 15

Berdasarkan Gambar 5.8, upaya perbaikan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru meliputi pengurangan overcrowding, penambahan petugas, serta peningkatan fasilitas. Pengurangan overcrowding bertujuan mengurangi tekanan lingkungan, penambahan petugas meningkatkan efektivitas pengawasan, dan peningkatan fasilitas mendukung terciptanya kondisi yang lebih kondusif. Ketiga langkah tersebut menunjukkan adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengamanan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi overcrowding berkaitan erat dengan meningkatnya potensi konflik warga binaan, terutama karena tingginya intensitas interaksi dalam ruang yang terbatas. Kepadatan hunian tidak hanya berdampak pada keterbatasan fisik seperti ruang gerak dan fasilitas, tetapi juga memunculkan tekanan psikologis yang mendorong terjadinya gesekan sosial. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention Theory*, kondisi ini mencerminkan bagaimana lingkungan yang padat dan kurang kondusif dapat membuka peluang terjadinya konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Rahman, 2023) yang menunjukkan bahwa overcrowding meningkatkan ketegangan sosial dan risiko konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan overcrowding sebagai faktor yang memengaruhi stabilitas sosial warga binaan, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada keterkaitan overcrowding dengan sistem pengamanan dan pengendalian konflik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Selain faktor overcrowding, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pengamanan memiliki peran penting dalam mengendalikan potensi konflik warga binaan. Pengawasan langsung oleh petugas, patroli keliling, serta pembatasan pergerakan menjadi strategi utama dalam menjaga stabilitas keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention Theory*, langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya *increase the risks* melalui peningkatan pengawasan, serta *increase the effort* dengan membatasi ruang gerak warga binaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tyana & Kurnianingsih, 2025) yang menunjukkan bahwa overcrowding dan ketidakseimbangan rasio petugas dengan warga binaan memengaruhi efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pengawasan dalam menjaga stabilitas keamanan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan hubungan antara sistem pengamanan, overcrowding, dan potensi konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Di sisi lain, keterbatasan jumlah petugas menyebabkan pengawasan belum merata di seluruh titik sehingga pelaksanaan sistem pengamanan masih menghadapi kendala di lapangan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pencegahan konflik tidak hanya dilakukan melalui pendekatan keamanan formal, tetapi juga melalui interaksi yang lebih personal antara petugas dan warga binaan. Pendekatan persuasif, seperti komunikasi interpersonal dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar, berperan dalam menjaga stabilitas sosial di dalam lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang lebih dekat ini mendorong munculnya rasa segan dan kepatuhan sehingga potensi konflik dapat ditekan sejak awal. Dalam kerangka *Situational Crime Prevention Theory*, kondisi ini mencerminkan strategi *reduce provocations*, yaitu mengurangi tekanan emosional dan sosial yang dapat memicu konflik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Prabawani et al., 2025; Sibarani & Rahmat, 2024) yang menunjukkan bahwa pendekatan manusiawi dan pembinaan sosial berperan dalam menciptakan kondisi pemasyarakatan yang lebih kondusif di tengah permasalahan overcrowding. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pendekatan persuasif dan hubungan sosial dalam menjaga stabilitas keamanan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan keterkaitan pendekatan tersebut dengan pencegahan konflik warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Selain upaya pencegahan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penanganan konflik dilakukan melalui langkah yang relatif cepat dan terstruktur, dimulai dari pengamanan awal hingga pemisahan pihak yang terlibat. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan konflik secara langsung sekaligus mencegah eskalasi yang lebih luas. Proses pemeriksaan lanjutan juga dilakukan untuk mengetahui penyebab konflik serta menentukan langkah tindak lanjut. Dalam kerangka *Situational Crime Prevention Theory*, penanganan ini mencerminkan upaya pengendalian situasi agar peluang terjadinya konflik lanjutan dapat diminimalkan. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Iqbal & Malau, 2026) yang menunjukkan bahwa kondisi overcrowding dan keterbatasan pengawasan meningkatkan potensi gangguan keamanan sehingga diperlukan respons pengamanan yang cepat dan terstruktur di lembaga pemasyarakatan. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pengendalian situasi dalam menjaga stabilitas keamanan lapas, sedangkan penelitian ini lebih menekankan mekanisme penanganan konflik warga binaan melalui pengamanan awal dan pemisahan pihak yang terlibat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa overcrowding memengaruhi stabilitas keamanan dan dinamika sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru. Tingginya kepadatan hunian meningkatkan intensitas interaksi antarwarga binaan sehingga potensi gesekan dan konflik lebih mudah muncul. Dalam kondisi tersebut, sistem pengamanan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol fisik, tetapi juga sebagai upaya pengendalian situasi melalui pengawasan, patroli, pembatasan pergerakan, dan pendekatan persuasif. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention Theory*, berbagai bentuk pengamanan tersebut mencerminkan upaya meningkatkan pengawasan (*increase the risks*), membatasi peluang pelanggaran (*increase the effort*), serta mengurangi tekanan sosial yang dapat memicu konflik (*reduce provocations*). Namun, efektivitas pelaksanaan pengamanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas, kapasitas hunian, dan fasilitas yang belum memadai.

3. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru memengaruhi stabilitas keamanan dan dinamika sosial warga binaan. Kepadatan hunian meningkatkan tekanan psikologis, keterbatasan fasilitas, serta intensitas interaksi sosial yang berpotensi memicu konflik antarwarga binaan. Konflik umumnya dipicu oleh permasalahan sederhana, seperti senggol-senggolan, pembagian makanan, dan keterbatasan tempat tidur, namun berkembang akibat kondisi lingkungan yang padat dan penuh tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika konflik di dalam lapas berkaitan erat dengan kondisi struktural, terutama keterbatasan kapasitas hunian dan fasilitas.

Sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru dilakukan melalui pengawasan petugas, patroli keliling, pembatasan pergerakan, serta pendekatan persuasif kepada warga binaan. Penanganan konflik dilakukan melalui pengamanan awal, pemisahan pihak yang terlibat, dan pemeriksaan lanjutan sehingga konflik dapat dikendalikan secara cepat dan terstruktur. Namun, efektivitas pengamanan masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah petugas dan kondisi overcrowding yang menyebabkan pengawasan belum berjalan optimal. Dalam perspektif *Situational Crime Prevention Theory*, pengendalian situasi telah diterapkan melalui peningkatan pengawasan, pembatasan akses, dan pengurangan pemicu konflik, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan struktural di dalam lapas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, upaya perbaikan sistem pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru perlu difokuskan pada pengendalian kondisi overcrowding sebagai akar permasalahan utama. Kebijakan yang mendukung pengurangan jumlah warga binaan menjadi penting untuk menciptakan keseimbangan antara kapasitas hunian dan jumlah penghuni. Dengan kondisi ruang yang lebih layak, tekanan lingkungan dapat diminimalkan sehingga potensi konflik antar warga binaan dapat ditekan. Selain itu, peningkatan jumlah petugas pengamanan menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung optimalisasi pengawasan dan efektivitas kontrol terhadap aktivitas warga binaan. Pengawasan yang lebih merata memungkinkan deteksi dini terhadap potensi konflik sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.

Perbaikan juga perlu dilakukan pada aspek fasilitas hunian melalui penyediaan sarana yang memadai, khususnya terkait tempat tidur dan kebutuhan dasar lainnya, agar tercipta kondisi yang lebih kondusif. Di sisi lain, penguatan sistem pengamanan perlu diimbangi dengan pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal antara petugas dan warga binaan guna menjaga stabilitas sosial di dalam lapas. Secara akademik, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas strategi pengamanan berbasis pendekatan humanis dan pengelolaan konflik dalam kondisi overcrowding pada lembaga pemasyarakatan yang berbeda. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif untuk melihat hubungan antara tingkat overcrowding, efektivitas pengawasan, dan potensi konflik warga binaan secara lebih luas.

4. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kantor Wilayah Riau atas pemberian izin penelitian melalui surat Nomor: WP.4-UM.01.01-1359 tanggal 02 April 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru atas dukungan dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2010). *Metodologi penelitian sosial dan hukum*. Granit.
- Antara.com. (2022). *Semarak Ramadhan di Lapas Bagan-Siapiapi tahanan terpadat Indonesia*.
<https://www.antaranews.com/berita/2812645/semarak-ramadhan-di-lapas-bagan-siapiapi-tahanan-terpadat-indonesia#:~:text=Seratusan warga binaan Lapas Bagansiapiapi semarakkan Ramadhan,bergiliran melaksanakan ibadah di Masjid At-Taubah Lapas>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2024). *Provinsi Riau dalam angka 2024*.
- Baffour, F. D., Francis, A. P., Chong, M. D., & Harris, N. (2023). Prison Overcrowding and Harsh Conditions: Health and Human Rights Concerns to Persons in Custody, Staff, and the Community. *Criminal Justice and Behavior*, 51(3), 375–400. <https://doi.org/10.1177/00938548231219803>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2024). *Pedoman sistem pengamanan lembaga pemasyarakatan*.
- Humas Lapas Kelas IIA Pekanbaru. (2024). *Data jumlah penghuni lapas*.
https://lapaspekanbaru.id/?utm_source=chatgpt.com
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2013). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. BPFE.
- Iqbal, M., & Malau, H. (2026). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN LAPAS DALAM MENEKAN TINDAK KRIMINAL DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB ANAK AIR PADANG. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 9(1).
- KBR. (2013). *Kerusuhan LP Tanjung Gusta Terbesar di Indonesia*.
<https://kbr.id/articles/indeks/kerusuhan-lp-tanjung-gusta-terbesar-di-indonesia>
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2024). *Data statistik pemasyarakatan nasional*.
- Koentjaraningrat. (1997). *Metode-metode penelitian masyarakat*. Gramedia.
- Kompas.com. (2021). *Kebakaran Lapas Tangerang dan masalah kelebihan kapasitas*.
<https://www.kompas.id/artikel/kelebihan-kapasitas-dinilai-tidak-ada-hubungannya-dengan-kebakaran-lapas>
- Lapas Kelas IIA Pekanbaru. (2022). *Laporan kinerja Lapas Kelas IIA Pekanbaru*.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*.
- Moeljatno. (2021). *Sistem keamanan lembaga pemasyarakatan*. RajaGrafindo Indonesia.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nudd, E., Aon, M., Kambanella, K., & Brasholt, M. (2024). Overcrowding in prisons: Health and legal implications. *Torture*, 34(3), 41–53. <https://doi.org/10.7146/torture.v34i3.147571>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Prabawani, R. D., Pujiyono, & Roikardi, D. (2025). Overcapacity in Indonesia's prisons: The role of criminal law reform in sustainable solutions. *Journal of Law and Legal Reform*, 6(4).
- Prakoso, A. (2022). Evaluasi sistem pengamanan lapas dalam kondisi overcrowding. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 67–83.
- QSR International. (2020). *NVivo qualitative data analysis software*.
- Rahman, I. (2023). Hubungan overcrowding dengan konflik di lapas Indonesia. *Jurnal Penelitian Kriminologi*, 12(1), 56–72.
- Sarosa, S. (2017). *Penelitian kualitatif: Dasar-dasar*. Indeks.
- Sibarani, I., & Rahmat, D. (2024). Peran Satuan Pengamanan dalam Upaya Pencegahan Keributan Antar Warga Binaan di Lapas Siborong Borong Kelas II B. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*, 1(1), 11–21.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif, dan mix method*. Rajawali Pers.
- Sudirman, T. (2020). *Alternatif pemidanaan sebagai solusi overcrowding lapas*. Refika Aditama.
- Sukmadinata, N. S. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, B. (2005). *Metode penelitian sosial*. Kencana Prenada Media Group.

- Tyana, I. N., & Kurnianingsih, M. (2025). The impact of prison overcrowding on the rights and well-being of inmates in Indonesia: A legal perspective. *Jurnal Al-Hakim*, 7(1).
- Wicaksono, A. (2022). Sistem pemasyarakatan di Indonesia: Antara pembinaan dan penghukuman. *Jurnal Hukum & HAM*, 14(3), 45–59.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.